

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Keadaan Pengawas Persekolahan

Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah pada tingkat dasar dan menengah selama 33 tahun terakhir telah dilaksanakan berbagai peningkatan baik kuantitas maupun kualitas selaras dengan strategi kebijakan nasional. Tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dana bantuan pinjaman luar negeri, telah dihabiskan untuk pembangunan fisik dan non fisik.

Penerapan konsep-konsep pembelajaran sebagai upaya inovasi dan kreativitas pemegang kebijakan pendidikan terus digulirkan ke persekolahan. Konsep-konsep tersebut mewarnai kurikulum, metode dan pengembangan kemampuan guru melalui berbagai penataran-penataran. Namun tampaknya pengembangan yang dilakukan selalu diakhiri dengan penyempurnaan program berikutnya, dan tidak pernah dihasilkan suatu kesimpulan apakah program yang diselenggarakan itu mengalami kegagalan atau keberhasilan berdasarkan evaluasi objektif.

Sebagai gambaran lapangan khususnya SMU Negeri dan Swasta di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kota Depok dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Sekolah Dengan Pengawas di Kabupaten Bogor dan Kota Depok

NO	KAB KOTA	SMU Negeri	SMU Swasta	JML.	JEMLAH PENGAWAS	RASIO
1	Kab Bogor	19	67	86	7	1:13
2	Kota Depok	5	42	47	4	1:12
	Jumlah	24	109	133	11	

Sumber: Diolah dari dokumentasi Kantor Dinas Pendidikan Kota/Kab Bogor

Pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara jumlah sekolah dengan tenaga pengawas yang ada. Di Kabupaten Bogor terdapat 86 SMU dilayani oleh 7 orang tenaga dan di Kota Depok terdapat 47 SMU dilayani oleh 4 orang pengawas.

Selanjutnya tenaga pengawas tersebut didistribusikan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pemetaan seperti pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Peta Wilayah Kerja

No	Jml Pengawas	Luas Wilayah Kota	Luas Wilayah Kabupaten	Jml Sekolah
1	4	22.75 km ² / 6 kecamatan	-	47
2	7	-	3.357.92 km ² / 24 kecamatan	86

Dari Tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa 47 sekolah tersebar di sekitar 30 kecamatan yang ada di Kota Depok dan Kabupaten Bogor, di mana setiap orang pengawas memperoleh SPJ untuk empat kali supervisi/bulan.

Seorang pengawas di Kota Depok dan Kabupaten Bogor harus melayani SMU Negeri dan Swasta dengan hari kerja empat kali SPPD. Selanjutnya apabila dirinci lagi secara detail, seperti setiap pengawas harus melayani pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap guru bidang studi, atau masalah manajerial sekolah, nampaknya sulit dibayangkan bagaimana pemecahannya atau jalan keluar yang diambil oleh pengawas sesuai dengan peran dan fungsinya. Kenyataan di lapangan seperti yang dikemukakan, menunjukkan proses pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Fenomena yang muncul ke permukaan kualitas pelayanan administratif dan substansi pengajaran di sekolah

masih kurang optimal. Salah satu hal yang dihadapi adalah berkaitan dengan tenaga pengawas sekolah, baik ditinjau dari kuantifikasi maupun kualifikasinya.

Supyan Nur Yahya (2001: 6) mengemukakan persoalan pengawasan :

“... di sekolah baik yang dilaksanakan oleh pihak kepala sekolah sebagai supervisor maupun yang dilaksanakan oleh pengawas yang ditunjuk oleh pihak berwenang, masih ditemukan berbagai hal. Pertama dipandang dari kuantitas pengawas yang ditunjuk oleh pihak berwenang masih belum memenuhi perbandingan yang ideal. Ideal seorang pengawas membina sekitar 10 - 15 SLTP/SMU, jadi dilihat jumlah 4500 SLTP/SMU Negeri dan Swasta di Propinsi Jawa Barat, diperlukan sekitar 335 - 450 orang pengawas”

Pernyataan yang dikemukakan tersebut, memberikan gambaran nyata bahwa dilihat dari sudut kuantitas saja sudah tidak memadai apalagi ditinjau dari sudut kualitas (relevansi keahlian) dapat diprediksi persoalan yang terjadi di lapangan.

2. Dampak Keterbatasan Tenaga Pengawas Kependidikan

Berdasarkan temuan pendahuluan, memberikan gambaran bahwa persoalan pengawas sangat kompleks mulai dari jumlah, kualitas dan anggaran supervisi sekolah. Hal itu, dirasakan oleh setiap pengawas kurang optimal, seperti keterbatasan pelayanan supervisi klinis, analisis masalah lapangan, dan pemecahan masalah.

Dampaknya yang dirasakan oleh pihak sekolah, adalah :

- (1) Ketidaksamaan jumlah waktu pelayanan supervisi antara sekolah di pusat kota dengan pinggir kota atau kabupaten;
- (2) Supervisi cenderung bersifat pelaporan administratif sekolah secara kolektif yang diserahkan kepada seorang pengawas;
- (3) Supervisi klinis pengajaran bidang studi tertentu jarang dilakukan;
- (4) Pemecahan masalah hanyalah pada kasus yang bersifat pelanggaran aturan normatif kepegawaian, belum menyentuh esensi pembelajaran;

Selain yang dipaparkan terdapat juga pengakuan pengawas berkaitan dengan kemampuan terbatas, khususnya dalam pelayanan pemecahan persoalan metodologi pengajaran mengingat tidak didukung oleh latar belakang keahlian mata pelajaran yang relevan. Adapun persoalan utama di sekolah yang dihadapi para guru, yaitu kesulitan dalam pengajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris agar siswa mempunyai kemauan, motivasi dan senang untuk mempelajarinya. Hal itu sangat beralasan mengingat untuk mata pelajaran tersebut belum menjadi tradisi belajar dan berpikir siswa, seperti digambarkan pada hasil ulangan harian atau ujian akhir untuk mata pelajaran tersebut rata-rata masih di bawah 6,0. Keadaan tersebut seyogyanya dilakukan suatu kajian yang dapat dilakukan pada tingkat sekolah, melalui analisis diagnosis bersama antara guru mata pelajaran, kepala sekolah dan pengawas yang kompeten. Tugas pengawas mata pelajaran sangat strategis dalam lingkungan sekolah, mengingat guru memerlukan konsultasi dan diskusi mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yaitu PBM.

3. Kebijakan Pemerintah Berkenaan Dengan Tenaga Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.118/1996. Seorang pengawas dalam proses dan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah telah dilindungi peraturan pemerintah. Ditinjau dari sudut pandang profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab, harus mempunyai beberapa kriteria yang sesuai dengan peran dan fungsi pengawasan.

Konsekuensi logis dari tugas adalah kemampuan profesional yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan tertentu. Supervisi pendidikan merupakan

usaha (apa yang dilakukan seorang pengawas) untuk memperbaiki pola kerja sekolah yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar. Selanjutnya supervisi lebih berkaitan dengan aspek pengajaran, sebagai tugas pokok sekolah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pengembangan proses belajar mengajar. Penekanan supervisi pada aspek pengajaran berarti upaya pembinaan apapun yang dilakukan oleh supervisor pendidikan terhadap suatu sekolah pada hakikatnya harus mengarah pada upaya memberikan bantuan kepada para guru dalam proses pengajaran.

Mengkaji persoalan kompetensi pengawas sangatlah pelik, mengingat sampai saat ini belum ada dan belum terdefinisi secara ilmiah melalui analisis jabatan berkaitan dengan standar kompetensi pengawas. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja, atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. Oleh sebab itu ia mempunyai wewenang dalam pelayanan profesionalismenya.

W.R. Houston (1974:7) mengungkapkan bahwa :

“kecakapan kerja diejawantahkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial, dan ekonomi, serta memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui dan disahkan oleh kelompok profesinya atau oleh warga masyarakat”. Secara nyata orang kompeten mampu melakukan tugasnya di bidangnya secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi tidak hanya menunjuk pada kuantitas tetapi sekaligus menunjuk pada kualitas kerja.

Uraian tersebut, menunjukkan bahwa pengawas pendidikan yang memenuhi persyaratan diperlukan seperangkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah terstandar. Hal itu jika tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan di masa depan, pengawas yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional akan tergeser oleh peran pengawas independen yang profesional.

Mengamati keadaan di lapangan, sering ditemukan adanya ketidakjelasan antara pengawas mata pelajaran dan manajemen sekolah pada saat supervisi, sehingga terjadi salah persepsi antara guru dengan pengawas. Guru mengharapkan terjadinya dialog atau diskusi mengenai masalah pembelajaran di kelas, sedangkan pengawas memberikan bimbingan masalah administrasi. Ada kalanya terjadi sebaliknya, di saat kepala sekolah meminta penjelasan masalah manajemen sekolah, tetapi pengawas membahas masalah mutu pembelajaran. Persoalan tersebut, menimbulkan salah persepsi antara harapan guru, kepala sekolah dengan tugas dan wewenangnya pengawas yang diharapkan.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang menitik beratkan pada hubungan antara persepsi guru dan kepala sekolah dengan tugas dan wewenang pengawas (supervisor) selaras dengan peran dan fungsi jabatan yang diembannya.

B. Perumusan Masalah

Bappenas dan Bank Dunia di Jakarta Tahun 1999 mengadakan konprensi tenaga kependidikan dan terungkap sinyalemen mengenai kondisi pengawas sekolah saat ini, "Pengawas pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk memacu mutu pendidikan, harus mengutamakan aspek-aspek akademik dari pada administratif (sebagaimana yang berlaku selama ini). Oleh sebab itu, jabatan sebagai pengawas/penilik harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berkemampuan dan menguasai bidang tugasnya, memiliki latar belakang yang sesuai, serta disiapkan secara sistematis melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Harus dihindari jabatan pengawas sekolah diduduki oleh orang-orang yang tidak layak atau hanya menunggu masa pensiun”.

Sinyelemen tersebut, tampaknya ada indikasi penyimpangan peran dan fungsi pengawas ditinjau dari tugas utamanya. Hal itu sejalan dengan temuan pengamat pengawas senior di lingkungan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat, yang mengemukakan :

- (a) Tempat tinggal pengawas jauh SLTP dan SMU dari wilayah atau lokasi sekolah yang diawasinya
- (b) Jumlah pengawas bidang studi tidak sebanding dengan jumlah ideal yang seharusnya 1 : 15 kenyataannya > 1 : 30
- (c) Satu orang pengawas membina sampai 50 Kepala Sekolah (SLTP/SMU)
- (d) Banyak pengawas yang tidak berpengalaman dalam persekolahan
- (e) Tidak membuat laporan hasil supervisi klinis
- (f) Pelaksanaan pengawasan bersifat kolektif di beberapa sekolah dalam satu kali supervisi administratif

Keadaan tersebut menunjukkan suatu permasalahan pengawas yang harus segera memperoleh perhatian dari pihak berwenang. Peran dan fungsi pengawas tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan pendidikan, seperti pelaksanaan kurikulum, evaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas, perbaikan, dan peningkatan kemampuan profesional guru, dan manajemen sekolah.

Selaras dengan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dalam penelitian ini diajukan perumusan masalahnya adalah :

“Bagaimana hubungan antara persepsi guru, kepala sekolah dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas SMU di Kabupaten Bogor dan Kota Depok ”

Selanjutnya pokok masalah tersebut dirinci menjadi fokus penelitian sebagai berikut :



1. Bagaimana hubungan antara persepsi guru mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas mata pelajaran SMU ?
2. Bagaimana hubungan antara persepsi kepala sekolah dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas manajemen SMU ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pengawas SMU sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya, berdasarkan persepsi guru mata pelajaran dan kepala sekolah.

Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

- a. Hubungan antara persepsi guru mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas mata pelajaran.
- b. Hubungan antara persepsi kepala sekolah dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas manajemen sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dipandang dari dua aspek penting yakni aspek teoretis dan aspek praktis.

- a. **Aspek teoretis** diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan konsep supervisi pendidikan melalui eksplorasi empirik dan analisis teoretis. Selain itu dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan profesionalisasi pengawas pendidikan.

b. **Sedangkan aspek** praktis diharapkan hasil penelitian ini apat dijadikan bahan masukan bagi pemerhati peningkatan kualitas pendidikan khususnya pihak pejabat berwenang dalam menetapkan calon pengawas pendidikan tingkat SMU khususnya :

- (1) Dapat dijadikan landasan sistem pengembangan profesionalisasi pengawas pendidikan dalam rangka pelaksanaan peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- (2) Dapat dijadikan landasan pemeliharaan profesional pengawas pendidikan mulai dari rekrutment sampai dengan promosi jabatan fungsional pengawas SMU di Kabupaten Bogor dan Depok

D. Definisi Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini bersifat korelasional, dan fokus pada hasil maka metode yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif. Variabel independen adalah persepsi guru (X_1) dan kepala sekolah (X_2), dan variabel dependen yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas (Y). Untuk menganalisis hubungan antara variabel dilakukan perhitungan statistik korelasional dan regresi sederhana dengan bantuan program SPSS Window Versi 10.0. Sebagai gambaran pemahaman yang sama terhadap apa yang akan diteliti, maka perlu dikemukakan konsep variabel yang menjadi fokus penelitian ini.

1. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah

Persepsi adalah proses seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu

pengalaman psikologis. Individu menggunakan panca indera untuk mengenal lingkungan, pandangan, sentuhan, pendengaran, pengecap, dan pembauan (Gibson, 1995).

Persepsi pada dasarnya menyimpan, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran utuh. Oleh karena itu setiap orang memberikan arti sendiri terhadap rangsangan yang berbeda dalam melihat hal sama dengan cara yang berbeda. Seorang pekerja melihat keadaan seringkali mempunyai arti yang lebih banyak untuk mengerti perilaku daripada keadaan itu sendiri. Peta kognitif individu bukanlah penyajian foto dunia fisiknya, melainkan suatu bagian gambaran pribadi dimana objek tertentu dipilih oleh individu untuk peranan utama, dirasakan dalam sikap individu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi guru mata pelajaran (X_1) meliputi:

- (1) Menerima kehadiran pengawas mata pelajaran pada saat supervisi kelas
- (2) Menunjukkan perencanaan pengajaran (analisis kurikulum, analisis materi pelajaran, satuan pelajaran, dan daftar penilaian siswa)
- (3) Mempersiapkan diri untuk diobservasi pada saat PBM
- (4) Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengawas berkaitan dengan persoalan yang dihadapi di kelas
- (5) Mengajukan persoalan atau kendala yang dihadapi di kelas, seperti dalam pejabaran materi pelajaran, metode penyajian, penggunaan alat bantu, dan evaluasi
- (6) Menerima bimbingan dan mencoba melaksanakan hasil konsultasi dengan pengawas
- (7) Mengajukan gagasan, ide, atau temuan hasil penelitian guru kepada pengawas berkaitan dengan PBM.

Adapun yang dimaksud dengan persepsi kepala sekolah tentang tugas dan peran pengawas manajemen (X_2), meliputi :

- (1) Menerima kehadiran pengawas manajemen sekolah
- (2) Menunjukkan dokumentasi administrasi yang ada sesuai permintaan pengawas

- (3) Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengawas berkaitan dengan pelaksanaan manajerial sekolah
- (4) Mempersilahkan untuk pelaksanaan pembimbingan kepada tenaga teknis Tata Usaha sekolah dalam rangka perbaikan administrasi sekolah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Menerima bimbingan ke tata usahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, sarana dan parasarana serta urusan perkantoran, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (6) Menerima bimbingan hubungan kerjasama sekolah, dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat antara lain dengan Pemerintah Daerah, dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan
- (7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah, antara lain kalender pendidikan, penerimaan murid baru, mutasi murid, evaluasi belajar tahap akhir, pembagian rapor, dan kegiatan insidental lainnya;
- (8) Mengajukan gagasan, ide sekolah berkaitan dengan temuan yang dipandang bermanfaat bagi pertimbangan pengambil kebijakan

2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya Pengawas

Salah satu tugas dan wewenangan pengawas mata pelajaran dan manajemen sekolah adalah berhadapan dengan klien (guru dan kepala sekolah), oleh sebab itu ia harus memiliki kemampuan dan memiliki standar, dengan prinsip mandiri (otonom) atas keilmuannya. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja, atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. Selain itu, ia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang diembannya, serta ada dukungan atau fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya.

Alfonso et al (1981) menggambarkan bahwa :

“sumber, arah dan tujuan supervisi pendidikan, bertolak dari sumber perilaku supevisi pengajaran dalam upaya mempengaruhi perilaku pelaksanaan tugas pokok guru adalah tujuan organisasi dan kebutuhan guru. Oleh sebab itu, seorang supervisor dituntut memahami dan peka terhadap tujuan organisasi dan kebutuhan guru sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pokoknya.

Peter F.Olivia (1976:19-20), mengemukakan bahwa :

“sorang pengawas dapat berperan sebagai : (1) mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas guru dalam kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang studi yang dibina guru, (2) memberikan bantuan pemecahan masalah yang dialami guru dalam pelaksanaan tugasnya (3) memimpin kelompok guru dalam mengembangkan kurikulum, dan penyusunan materi pelajaran. (4) evaluator dalam penilaian hasil dan proses belajar.

Bertolak dari konsep tersebut, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengawas SMU (Y), yaitu :

- (1) Menyusun rencana kegiatan tahunan pengawas jenis sekolah yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengendalikan termasuk membimbing tenaga teknis sekolah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga agar kuantitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (5) Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perkantoran, agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama sekolah, dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat antara lain dengan Pemerintah Daerah, dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan;
- (7) Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu;
- (8) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekolah, antara lain kalender pendidikan, penerimaan murid baru, mutasi murid, evaluasi belajar tahap akhir, pembagian rapor, dan kegiatan insidental lainnya;
- (9) Menilai pemanfaatan sarana sekolah;
- (10) Menilai efisiensi dan efektivitas tata usaha sekolah;
- (11) Menilai hubungan sekolah dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan;
- (12) Mempersiapkan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala SMTP/SMTA/SLB;
- (13) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk perhatian Kepala Bidang yang relevan.

E. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Penelitian

Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah, tidak dapat terlepas dari konsep pendidikan secara utuh. Artinya, sekolah sebagai sistem organisasi yang bertujuan yaitu pencapaian pendidikan melalui manajemen. Sekolah hakikatnya

melaksanakan amanat masyarakat melalui mekanisme yang diperkuat oleh sistem nilai atau filosofis, suatu bangsa melalui proses belajar mengajar secara klasikal dalam makna pembelajaran individu.

Sekolah dipandang dari sudut organisasi adalah sebagai suatu sistem yang dibangun dari komponen-komponen pendukung dalam daya upaya pencapaian tujuan, yaitu pelayanan pendidikan terhadap peserta didik. Proses pelayanan pendidikan dilakukan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan pihak yang terkait, seperti siswa, guru dan orang tua baik berkenaan dengan tuntutan peraturan maupun harapan pelayanan dan perolehan pembelajaran.

Organisasi sekolah tidak ada perbedaan dengan organisasi formal lainnya yakni suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, yang membedakan hanya substansi dan esensinya. Hal tersebut, sejalan dengan Richard L. Daft (1986:9) mengemukakan bahwa "*Organizations are social entities that are goal-directed, deliberately structured activity systems with and identifiable boundary*". Pengertian itu, merupakan inti dari organisasi, yang pada dasarnya dapat diidentifikasi berdasarkan tujuan, lingkup dan peran serta fungsinya.

Organisasi dapat dipandang sebagai sistem, sebab merupakan serangkaian komponen yang saling terkait dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk mentransferkan serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan ketuaran merupakan realitas dari ketergantungan organisasi terhadap lingkungan. Masukan terhadap sistem organisasi mencakup perangkat lunak dan keras, selaras dengan

perkembangan yang terjadinya pada lingkungan. Tujuan pendidikan dapat dicapai, tidak hanya ditentukan oleh seorang akan tetapi seluruh komponen terkait, seperti kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, siswa dan masyarakat (orang tua dan partisipan pendidikan lainnya). Oleh sebab itu, untuk pencapaian tujuan pendidikan diperlukan adanya fungsi administrasi dan manajerial yang efektif.

Administrasi pendidikan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil, dan iklim organisasi yang kondusif, serta menentukan perubahan esensial fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat di masa depan.

Engkoswara (1987:1) mengemukakan bahwa :

“administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif”. Selanjutnya mengatakan penataan mengandung makna, “mengatur, manajemen, memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, atau membina”. Sumber dayanya terdiri dari; (1) sumber daya manusia (peserta didik, pendidik, dan pemakai jasa pendidikan), (2) sumber belajar atau kurikulum (segala sesuatu yang disediakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan), dan (3) fasilitas (peralatan, barang, dan keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan). Tujuan pendidikan yang produktif berupa prestasi yang efektif, dan suasana atau proses yang efisien. Selanjutnya keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang produktif dapat dilihat dari sudut administratif, psikologis, dan ekonomis.

Hadari Nawawi (1989:15) mengklasifikasikan garapan administrasi pendidikan ke dalam dua bidang, yakni:

(1) bidang manajemen administratif, (2) bidang manajemen operatif. Bidang manajemen administratif memfokuskan pada kegiatan; perencanaan;

organisasi, bimbingan/ pengarahan; koordinasi dan pengawasan serta komunikasi. Adapun manajemen operatif memfokuskan pada kegiatan tata usaha perbekalan, kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat.

Pengertian dari konsep administrasi pendidikan yang telah dipaparkan, memberikan implikasi terhadap aspek-aspek yang terkait dalam suatu lingkungan pendidikan, baik secara makro, meso maupun mikro untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya sesuai dengan fungsi administrasi dipandang dari sistem, sub sistem, komponen, dimensi, unsur dan kriteria. Proses administrasi pendidikan diperlukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan, salah satu pendekatan yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan administrasi terpadu ialah suatu pendekatan dilandasi oleh norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam, berorientasi ke masa depan secara cermat.

Bertolak dari uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa dalam pencapaian tujuan pendidikan, salah satu aspek yang strategis adalah sistem pengawasan sebagai komponen administrasi pendidikan. Pengawas merujuk kepada suatu tugas profesional pendidikan, yang harus memahami dan mampu keahlian dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Seorang profesional tidak hanya sekedar menjadi mandor sekolah, melainkan dapat memberikan bimbingan ke arah pembelajaran atau manajemen sekolah yang lebih baik.

Pengawasan pendidikan saat ini dilaksanakan oleh pihak eksternal yakni pengawas sebagai pejabat fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah. Peran dan fungsinya, secara konseptual bertumpu pada pembinaan profesional.

2. Paradigma Penelitian

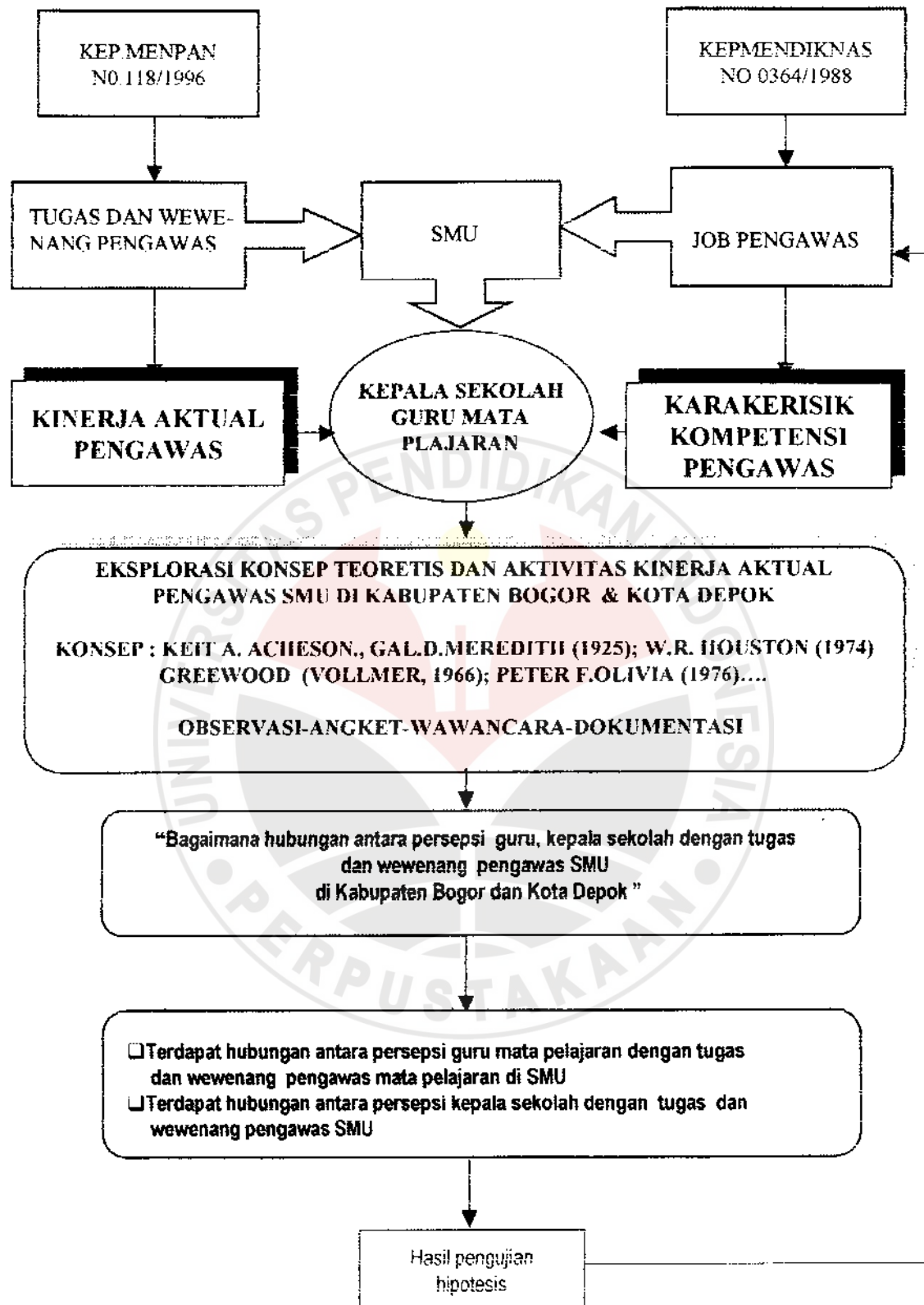
Paradigma merupakan kumpulan longgar dari asumsi yang dipegang bersama konsep, atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan and Biklen (1992:33) bahwa; *Paridgm is a loose collection of logically health to gether assumtion, concepts or propotitions the orien thingking or research.* Paradigma juga memiliki pengertian sebagai (1) suatu model dalam teori ilmu pengetahuan, dan (2) kerangka berpikir.

Paradigma dalam penelitian ini bertolak dari bagaimana kompetensi pengawas SMU yang selaras dengan tuntutan kebutuhan guru bidang studi dan manajemen sekolah. Supervisi pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas pendidikan yang dilakukan oleh pejabat fungsional, harus mengarah kepada pembinaan profesional bidang pengajaran dan manajemen sekolah, sebagaimana ditekankan oleh para ahli seperti WH Lucio dan John D, Mc Neil (1969:12) yang menggambarkan perkembangan supervisi pendidikan sebagai berikut :

- (1) Supervisi pendidikan diarahkan pada perbaikan situasi belajar mengajar.
- (2) Supervisi sebagai social process karena selama pelaksanaan supervisi disampaing harus melibatkan banyak personil juga sarana prasarana pendukung baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- (3) Supervisi pendidikan berimplikasi pada terwujudnya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang disupervisi baik selama proses maupun pengambilan keputusan.

Bertolak dari kondisi tuntutan seorang profesional maka pengawas harus mempunyai seperangkat pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Paradigma dalam penelitian ini, merujuk pada kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian. Paradigma penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 1.2.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

3. Premis-Premis Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir maka sebelum diajukan hipotesis terlebih dahulu dikemukakan premis-premis berikut ini :

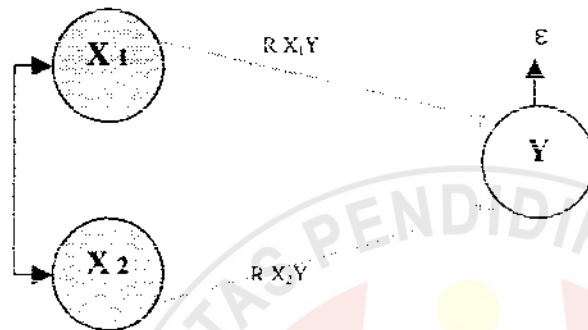
- a. Kinerja merupakan hasil perpaduan dari kecakapan dan motivasi, dimana masing-masing variabelnya dihasilkan dari sejumlah faktor lain yang saling mempengaruhi (Sutermeister, 1976:11).
- b. Suatu tindakan atau tugas personil dalam organisasi, dipengaruhi oleh persepsi suatu keadaan (Gibson., Ivancevich., Donnelly, 1995:135)
- c. Administrasi dan supervisi mempunyai hubungan yang erat, mengingat supervisi sebagai salah satu fungsi dari administrasi. Akan tetapi, dalam implementasinya ada penekanan yang khas dalam supervisi yaitu :
 - (1) Supervisi didasarkan pada pelayanan bimbingan dan pembinaan;
 - (2) Supervisi merupakan bagian dari tugas pengarahan (*directing*) di sekolah;
 - (3) Supervisi menggunakan kondisi yang telah disediakan di sekolah;
 (Made Pidarta, 1992:40).

4. Hipotesis Penelitian

Selaras dengan berpijak pada premis-premis yang ada, maka hipotesis yang diajukan adalah :

- a. Terdapat hubungan antara persepsi guru mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas di SMU
- b. Terdapat hubungan antara persepsi kepala sekolah dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas SMU

Variabel yang diteliti adalah, Persepsi guru mengenai kinerja pengawas (X_1), persepsi kepala sekolah mengenai kinerja pengawas (X_2), pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas (Y).



Gambar 1.2: Hubungan Variabel Penelitian

Variabel independen :

X_1 = Persepsi guru mata pelajaran mengenai pengawas mata pelajaran

X_2 = Persepsi kepala sekolah mengenai pengawas manajemen sekolah

Variabel dependent

Y = Pelaksana tugas dan wewenang pengawas

E. Prosedur Penelitian

1. Metode

Sebagaimana telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, penelitian ini bermaksud mengungkapkan hubungan antara variabel melalui studi korelasi atau regresi, dan uji hipotesis tertentu. Metode yang tepat untuk penelitian ini metode eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data yang dihasilkan melalui angket diolah dengan analisis korelasi, regresi dengan bantuan program SPSS Window Versi 10.0.

2. Populasi dan Sampel

Wilayah penelitian secara total dari dua wilayah, hasil perhitungan statistik dapat dituliskan berikut ini:

- (1) Jumlah yang dijadikan sampel 120 orang guru SMU Negeri dan Swasta
- (2) Jumlah yang dijadikan sampel 120 orang kepala SMU Negeri dan Swasta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan aktivitas, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (1) studi kepustakaan, (2) kuesioner, (3) Observasi. Sebagai alat pengumpul data peneliti mencoba menyusun alat atau instrumen yang disesuaikan dengan sistematis dan konstruks berkaitan dengan kinerja dan karakteristik kompetensi pengawas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi perhatian adalah (1) wilayah Kabupaten Bogor, (2) Wilayah Kota Depok. Alasan mengapa daerah tersebut, dijadikan lokasi penelitian dikarenakan kedua wilayah tersebut merupakan kabupaten yang berbatasan dengan daerah Ibu Kota Negara. Sehingga dalam konteks otonomi daerah, dapat dijadikan suatu kajian yang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan kota pendidikan di kemudia hari.